

LAPORAN SEKTOR Badan Kepegawaian Daerah Mei 2017 SKPD BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NO	NAMA	LAPORAN	WAKTU	TANGGAPAN	STATUS
1	smslaporgub (62821xxxxxxx)	Bpk Ganjar Yth.saya sprihadi,pagersari,bergas,kab.semarang,mohon penjelasan tentang SELEKSI SEKDES,dalam tahapannya setelah hasil seleksi dari tim penguji diumumkan masih harus menunggu REKOMENDASI dari kecamatan yang intinya persetujuan atau penolakan,apakah dalam tahapan ini ada kemungkinan MENGANULIR hasil seleksi tim penguji,bila ya apakah penyebabnya ? Terimakasih.	01-05-2017 18:39	maaf pengadaan SEKDES bukan Kewenangan BKD njih	Laporan Bukan Wewenang
2	slamet (xtripxxxxxxx)	Oknum PNS di Kantor Kecamatan Jatinegara Kab. Tegal menggunakan tower milik kecamatan untuk bisnis WIFI. setiap warga yang ingin mendapatkan akses WIFI dikenai biaya 1 juta untuk pembelian alat dan biaya bulanan 100ribu. Apakah itu diperkenankan?	03-05-2017 11:50	terimakasih laporannya, akan km koordinasikan instansi terkait di kab tegal Terimakash laporannya, setelah kami koordinasikan denganTemen-temen di Kab Tegal, sebagaimana di sampaikan Kepala Bidang di Kominfo, Awalnya memang Perangkat tersebut diperuntukkan bagi desa disekitar Kecamatan Tersebut, dan akan segera dilepas bila peruntukannya sudah tidak semestinya, Silahkan ke depan apabila masih terpasang pd Tower tsb, bisa dikomunikasikan dengan Kominfo Kab. Tegal Njih... Terimakasih Perhatiannya...	Laporan Selesai

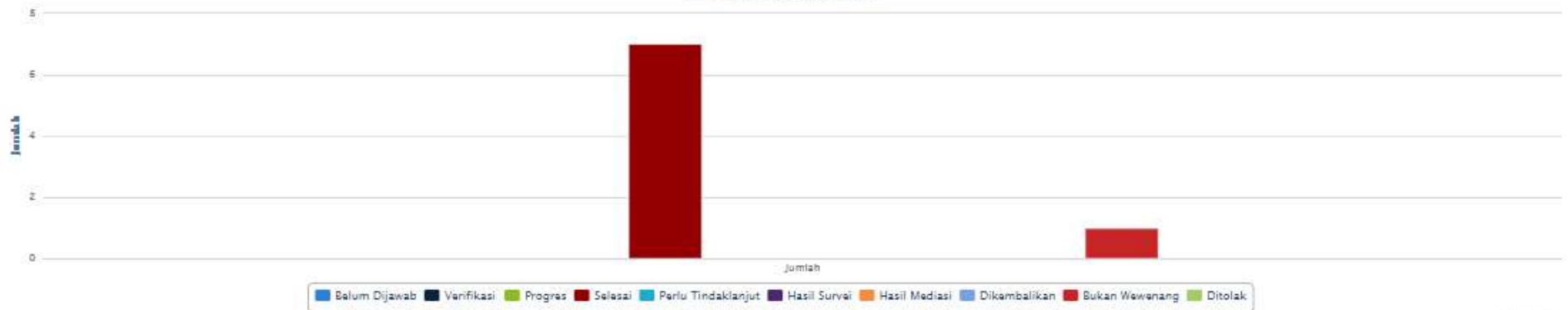
3	irul (08571xxxxxxx)	Assalamualaikum Maaf kalau saya mengganggu Nama saya khoirul umam Alamat desa kadirejo, kec pabelan kab semarang Saya bekerja di distanbun prov jateng Saya mau minta bantuannya, saya bekerja di dinas pertanian dan perkebunan provinsi jateng,,, gaji saya tidak sampai upah minimum,, Cleneng servis,driver dan satpam menggunakan sistem outsourcing. Anggaran yg dikeluarkan adl 2.000.000, tetapi potongan kami begitu banyak dan hak kami tdk diberikan Gaji: Cleneng servis : 1.460.000 Driver : 1.525.000 Scurity : 1.500.000 Bpjs kesehatan sebagian sudah dapat sebagian belum, dan pada bulan februari tidak dapat digunakan karna tidak dibayar. Bpjs ketenaga kerjaan dari tahun 2015 sampai sekarang ada yg belum dapat, seragam untuk satpam dapat 1 stell dengan potongan gaji per bulan 63.462 ribu,,padahal cleneng servis dapat 5 stell. thr dengan potongan 50.000 ribu perbulan, tetapi lebaran tahun kemaren hanya dapat 300.000. Hari cuti seperti lebaran tidak ada uang lembur, tunjangan dari pt juga tidak ada, Gaji bulan januari, februari, maret dilakukan dengan cara dicicil,, bulan april sampai sekarang belum digaji. Dari tahun kemaren tidak dilakukan tanda tangan kontrak, Menurut informasi pak ghofur sebagai pegawai distanbun mengatakan bahwa anggaran scurity ada 26 orang (sesuai anggaran pertanian), tetapi dia tidak tau ditempatkan dimana saja, dan yg ada dikantor pusat hanyalah 6 orang, alsin 1 org, bptph 1 org, spma yg sekarang ikut dinas pendidikan 5 orag, yg lain tidak diketahuinya Menurut keterangan pak abdul mutholib	08-05-2017 08:40	terimakasih laporannya akan kami koordinasikan dg Instansi terkait Hasil Konfirmasi dengan dinas Terkait, telah dilakukan verifikasi/pertemuan dengan yang bersangkutan diperoleh hasil sbb: Terjadi kesalahan pemahaman. Yang bersangkutan sudah memahami dan menerima hasil pertemuan, setelah dijelaskan perihal permasalahan yang dihadapi pelapor. Permasalahan sudah selesai dan pelapor telah bekerja kembali sebagaimana mestinya. Demikian Informasi yang dapat kami sampaikan,	Laporan Selesai
4	Nida (melodxxxxxxx)	BKD: Saya mau tanya seputar cuti bersalin PNS. kebetulan bulan depan saya mau melahirkan anak ke 3. namun SKPD saya tidak memberikan cuti dan hanya memberi ijin 40 hari, dengan alasan persalinan ke 3. apakah benar? setahu saya menurut PP no 11 tahun 2017 pemberian cuti melahirkan untuk persalinan pertama, kedua dan ketiga. terima kasih	09-05-2017 12:02	terimakasih lapornya akan kami koordinasikan dg bidan yg tangani njih Kalau Berpedoman pada PP No. 11 Tahun 2017, dapat menggunakan cuti melahirkan sampai dengan anak ke 3, silahkan dikoordinasikan dg Instansi Saudara, dengan menunjukkan PP tersebut diatas njih	Laporan Selesai

5	DWIYONO BANYUMAS (dwiyoxxxxxxx)	Yth. Bpk GANJAR PRANOWO, nama saya DWIYONO (PNS dari Pemkab Banyumas), mau menanyakan sekaligus curhat, berkaitan dengan kebikakan mutasi/permohonan pindah bagi PNS dari Pemkab ke Pemprov Jateng, apa masih dibatasi atau dilarang? karena yg sy tahu, katanya dilarang tapi masih ada yg diijinkan, sehingga menurut saya sering tidak konsisten dlm pengambilan kebijakan. Dan perlu diketahui sy sudah berhasil menghub langsung salah satu Kepala SKPD/OPD Pemprov Jateng, dan beliau SANGAT "WELCOME". Maturnuwun atas perhatiannya. Dan harap maklum kepada Pihak2 yg terkait. , Semoga pihak stakeholders yg memproses ijin memakuminya.	19-05-2017 08:36	Terimakasih laporannya akan diteruskan ke bidang yang menangani Menindaklanjuti Surat aduan/Lapor Gub Sdr. Dwiyono PNS Kabupaten Banyumas tanggal 19 Mei 2017 tentang Mutasi PNS Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada dasarnya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memenuhi kekurangan PNS masih masih membuka penerimaan Mutasi, adapun syarat-syarat Sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor : 800/001656 tanggal 17 Februari 2017 sebagai berikut : a. Syarat Administrasi : Surat pernyataan persetujuan pindah dari Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/Kota/Departemen/Instansi/Provinsi lain asal; Fc. SK CPNS legalisir; Fc. SK PNS legalisir; Fc. SK KP terakhir legalisir; Fc. Konversi NIP legalisir; Fc. Karpeg legalisir; Fc. SK Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru (bagi jabatan PNS guru); Fc. Ijazah legalisir; Fc. DP3/SKP2 tahun terakhir; dan Surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukum disiplin tingkat sedang/berat dari pimpinan SKPD asal. b. Syarat Kompetensi Kualifikasi Pendidikan sesuai dengan rincian kebutuhan formasi yang disediakan oleh SKPD; Memenuhi dan lulus tes uji kompetensi; Umur setinggi-tingginya 45 tahun terhitung dari tanggal surat diterima; Pangkat dan Golongan setinggi-tingginya Penata Tingkat I (III/d).	Laporan Selesai
6	Suryo saputro (suryoxxxxxxx)	http://berita.suamerdeka.com/smcetak/uji-kompetensi-dinilai-langgar-edaran/	24-05-2017 08:16	terimakasih laporannya... mohon yang ditanyakan masalah apa njih?, itu sebuah berita... jd kalau bertanya yg jelas, masalahnya apa. sehingga dapat dikoordinasikan terimakasih	Laporan Selesai

7	smslaporgub (62812xxxxxxx)	Selamat siang bpk gubernur jawa teng ah,YTH Bpk ganjar pranowo, mohon bantuannya knp dkab kodus ttg pengakatan cpns bidan ptt yg telah dtetapkan dr pusat sejak maret dan NIP telah didistribusikan ke kabupaten seluruh indonesia & hampir seluruhnya sdh dbagikan kbidan ptt semua, mengapa dKAB Kudus sampai skg lom dbagikan sendiri, tlg bpk gubernur masalah ini segera dtindak lanjuti?kasihan bidan lama menunggu	27-05-2017 21:28	njih kita koordinasikan njih dari hasil koordinasi dengah BKPP Kab Kudus, akan diberikan secepatnya oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/Bupati Kudus, terimakasih	Laporan Selesai
8	smslaporgub (62812xxxxxxx)	Yth.Bpk Ganjar Pranowo di Semarang Beberapa hari yl Rabu tgl.24 Mei 2017 kami melaporkan seorang PNS Dinas LHK PROP Jawa Tengah a/n lilis Eliya Amin Sudiar SP yg telah melakukan pelanggaran hukum yaitu penipuan penermaan CPNS utk wil Jateng surat diterima bag TU Gubernur yaitu bapak Sugeng S	31-05-2017 11:08	Njih Kami Teruskan ke yang menangani njih, Dari info bid yg tangani, akan klarifikasi, dan segera proses... terimakasih	Laporan Selesai

Grafik Berdasarkan Status Pelaporan 2017

Source: laporgub.jatangprov.go.id



http://harta.com

No.	Status Laporan	Jumlah
1	Belum Dijawab	0
2	Verifikasi	0
3	Progres	0
4	Selesai	7
5	Perlu Tindaklanjuti	0
6	Hasil Survei	0
7	Hasil Mediasi	0
8	Dikembalikan	0
9	Bukan Wewenang	1
10	Ditolak	0
Total		8